



Pencara Strategis
**BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO**

TAHUN 2025-2029





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
NOMOR 860 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE
PANGRANGO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti huruf a, telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi taman nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 hingga tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 - 2024 disusun sebagai acuan bagi penyusunan rencana kerja tahunan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pengendalian kegiatan unit kerja lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cibodas
Pada tanggal 23, Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR,



ARIEF MAHMUD
NIP. 196711301994031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE,
2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE,

Lampiran Keputusan
Nomor 860 Tahun 2025
Tentang
Rencana Strategis Balai Besar Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango
Tahun 2025-20209

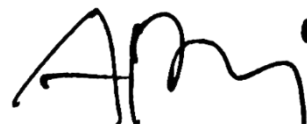
PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan arah pengelolaan TNGGP lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan tahunan BBTNGGP, selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Penyusunan Renstra ini mengacu pada *Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029* serta panduan teknis Permen PPN/Bappenas No. 10 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2025–2029. Dengan demikian, Renstra BBTNGGP 2025–2029 dirancang sejalan dengan visi Presiden “*Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*”, memastikan kontribusi taman nasional terhadap manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial secara terpadu.

Sebagai salah satu taman nasional hutan hujan tropis pegunungan di Jawa Barat, TNGGP memiliki peran vital dalam perlindungan keanekaragaman hayati, penyediaan jasa lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Renstra ini disusun secara matang dan inklusif agar setiap kegiatan terlaksana efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra 2025–2029 juga memperhatikan perubahan kebijakan terbaru di tingkat pusat, termasuk arahan *Renstra Kemenhut 2025–2029* dan *Renstra KSDAE 2025–2029*, sehingga program BBTNGGP adaptif terhadap perkembangan strategis seperti komitmen penurunan emisi karbon sektor kehutanan dan transformasi digital layanan. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BBTNGGP dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kolaborasi dengan para pihak demi pengelolaan TNGGP yang lestari dan berdaya guna.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen ini. Harapan kami, disusunnya Revisi Rencana Strategis tahun 2025-2029 ini dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dengan memperhatikan keterlibatan para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan TNGGP.

Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.

NIP. 19671130 199403 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

BBTNGGP menetapkan visi jangka menengah “Kelestarian hutan hujan tropis Gunung Gede Pangrango yang optimal bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.” Visi ini sejalan dengan visi KSDAE yaitu “Kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kesejahteraan masyarakat” serta mendukung visi pembangunan kehutanan nasional menuju Indonesia Maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun misi-misi strategis yang mencakup: (1) Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem; (2) Pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi hayati secara lestari bagi perekonomian lokal/nasional; (3) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan; dan (4) Penguatan tata kelola serta digitalisasi layanan konservasi.

Fokus strategi dalam Renstra 2025–2029 ini adalah integrasi antara upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. BBTNGGP akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengamanan hutan, restorasi ekosistem kritis, dan pengendalian ancaman (seperti perburuan dan spesies invasif). Pada saat yang sama, pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam dan jasa ekosistem air akan dioptimalkan berbasis perencanaan daya dukung, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Renstra ini juga menekankan penguatan kelembagaan internal melalui peningkatan kapasitas SDM dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik yang lebih responsif. Dukungan terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan pemulihan ekosistem menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap program, mengingat Kementerian menargetkan menurunnya emisi GRK dan laju deforestasi secara signifikan pada periode ini. Secara ringkas, Renstra BBTNGGP 2025–2029 diarahkan untuk mencapai konservasi yang lestari, masyarakat yang sejahtera, dan birokrasi yang adaptif dalam era digital.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	2
I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Capaian Kinerja	9
1.2.1 Kinerja Anggaran	9
1.2.2 Kinerja Konservasi Spesies dan Genetik	9
1.2.3 Kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan	12
1.2.4 Kinerja Pemulihan Ekosistem	14
1.2.5 Kinerja Perencanaan Pengelolaan	15
1.2.6 Kinerja Konservasi Kawasan	16
1.3 Potensi dan Tantangan	19
1.3.1 Potensi Keanekaragaman Hayati	19
1.3.2 Potensi Jasa Lingkungan	19
1.3.3 Potensi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Bioprospeksi	20
1.3.4 Tantangan Sebagai Pusat Pendakian dan Wisata Alam	20
1.3.5 Tantangan Sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati	21
1.3.6 Tantangan Sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat	21
II VISI DAN MISI	22
2.1 Visi dan Misi Kementerian Kehutanan	22
2.1.1 Visi Kementerian Kehutanan	22
2.1.2 Misi Kementerian Kehutanan	23
2.1.3 Tujuan Kementerian Kehutanan	23
2.1.4 Sasaran Strategis	24
2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE	24
2.2.1 Visi Direktorat Jenderal KSDAE	24
2.2.2 Misi Direktorat Jenderal KSDAE	25
2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE	26
2.4 Visi dan Misi BBTN Gunung Gede Pangrango	28
2.4.1 Visi BBTN Gunung Gede Pangrango	28
2.4.2 Misi BBTN Gunung Gede Pangrango	29
III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan	35
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	38

3.4	Arah Kebijakan dan Strategi BBTN Gunung Gede Pangrango	44
IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1	Target Kinerja	46
4.2	Identifikasi Risiko Target Kinerja	29
4.3	Tonggak Pencapaian (<i>Milestone</i>) Pembangunan	31
4.4	Kerangka Pendanaan	49
V	PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1 Analisis beban kerja	8
2	Tabel 2 Capaian pemulihan ekosistem BBTNGGP	14
3	Tabel 3 Perkembangan luasan zonasi kawasan TNGGP	15
4	Tabel 4 Tren gangguan kawasan TNGGP	17
5	Tabel 5 Indikator kinerja RPJMN 2025-2029 pada Ditjen KSDAE	46
6	Tabel 6 Indikator kinerja program Ditjen KSDAE 2025-2029	47
7	Tabel 7 Indikator kinerja kegiatan BBTNGGP tahun 2025-2029	48
8	Tabel 8 Kerangka pendanaan Ditjen KSDAE tahun 2025-2029	49
9	Tabel 9 Kerangka pendanaan BBTNGGP tahun 2025-2029	50

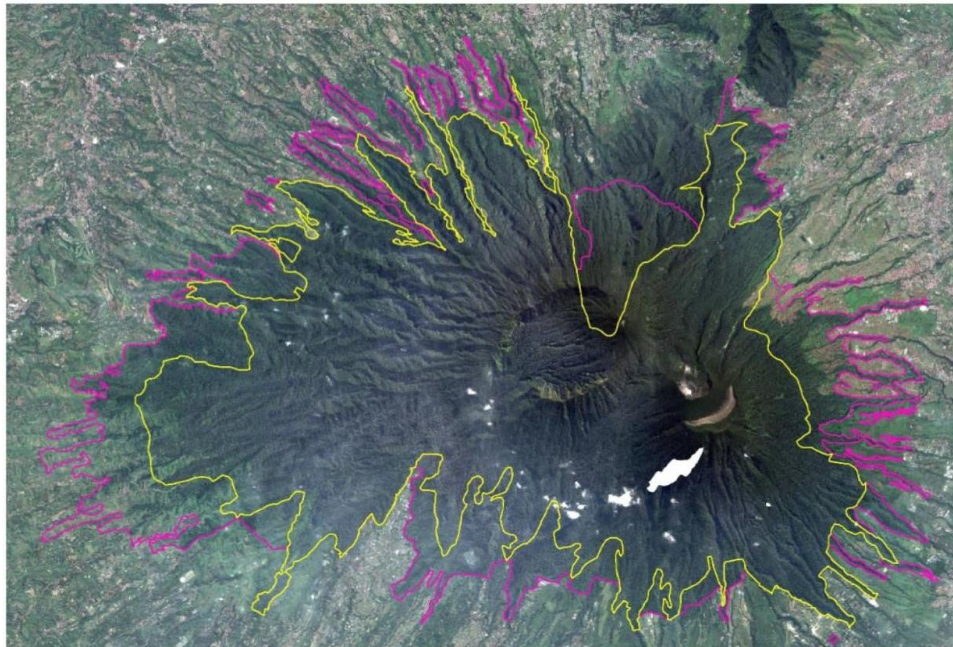
DAFTAR GAMBAR

10	Gambar 1 Peta penetapan awal dan perluasan kawasan TNGGP	3
11	Gambar 2 Peta penetapan kawasan TNGGP	4
12	Gambar 3 Struktur Organisasi BBTNGGP	7
13	Gambar 4 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan	8
14	Gambar 5 Kinerja anggaran BBTNGGP	9
15	Gambar 6 Tren hasil monitoring macan tutul jawa	10
16	Gambar 7 Tren hasil monitoring Owa Jawa	11
17	Gambar 8 Tren hasil monitoring Elang Jawa	11
18	Gambar 9 Potensi ODTWA di TNGGP	12
19	Gambar 10 Jumlah pengunjung dalam dan luar negeri	13
20	Gambar 11 PNBP dari kawasan TNGGP	14
21	Gambar 12 Perkembangan luas zonasi kawasan TNGGP	15
22	Gambar 13 Zonasi kawasan TNGGP per resor	16
23	Gambar 14 Sebaran KTH pada tiap Bidang Wilayah TNGGP	18

I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

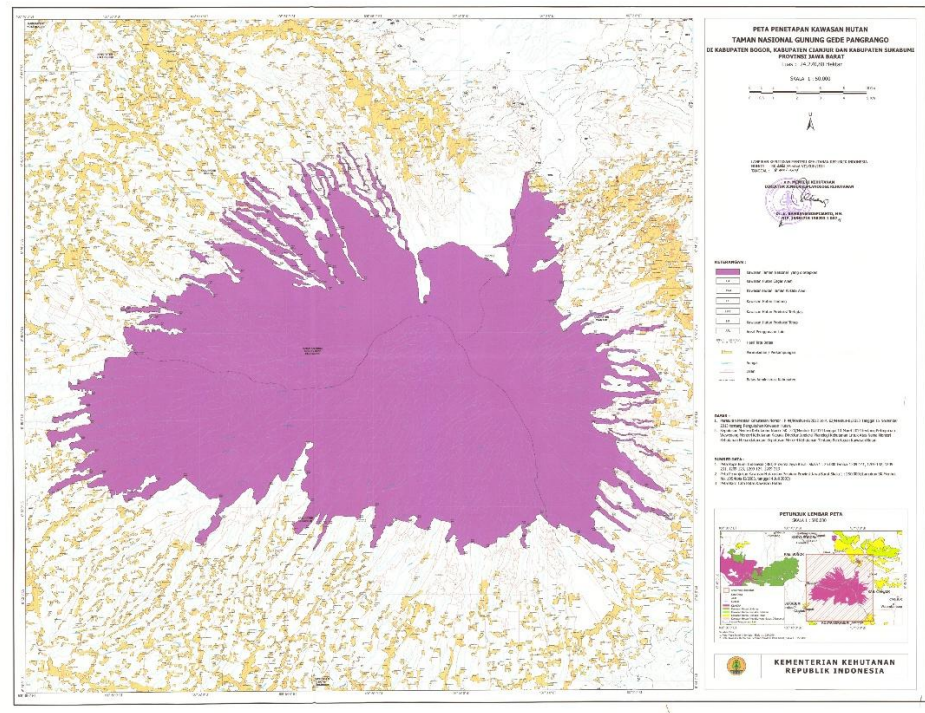
Secara geografis, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak antara 106°51' - 107°02' BT dan 6°41' - 6°51' LS dan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan berada di tiga wilayah kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi dan Bogor. TNGGP merupakan salah satu dari 5 (lima) taman nasional pertama di Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 6 Maret 1980 meliputi areal seluas 15.196 Ha. Kawasan ini merupakan kesatuan dari Cagar Alam Cibodas seluas 1.040 Ha, Cagar Alam Cimungkad seluas 56 Ha, Taman Wisata Situgunung seluas 100 Ha dan Hutan Lindung lereng Gunung Gede dan Gunung Pangrango seluas 14.000 Ha yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982.



Gambar 1 Peta penetapan awal dan perluasan kawasan TNGGP

Sebelum ditetapkan sebagai TNGGP, kelompok hutan tersebut ditetapkan sebagai zona inti Cagar Biosfer Cibodas oleh UNESCO pada Tahun 1977. Pada tahun 2003, kawasan TNGGP mengalami penambahan luas menjadi ± 21.975 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani. Penyerahan kawasan dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/SJ/DIR/2009-BA.6/IV-SET/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor

002/BAST- HUKAMAS/III/2009- 1237/II-TU/2/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar TNGGP seluas 7.655,03 Ha, sehingga total luas TNGGP menjadi 22.851,03 Ha. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat, luas kawasan TNGGP ditetapkan menjadi 24.270,80 Ha yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Peta penetapan kawasan TNGGP

Topografi TNGGP bervariasi mulai dari landai hingga bergunung dengan ketinggian berkisar antara 700 mdpl hingga 3.019 mdpl dan kemiringan lereng berkisar antara 20% - 80%. Gunung Gede (2.958 mdpl) dan Gunung Pangrango (3.019 mdpl) merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) gunung berapi di Jawa Barat namun Gunung Pangrango sudah tidak aktif sedangkan Gunung Gede masih aktif. Dalam kawasan TNGGP tercatat memiliki 58 sungai (Orde I) dan 1.075 anak sungai (Orde I dan Orde II) yang berhulu di dalam kawasan. Sebagian besar sungai (52%) berada di wilayah Kabupaten Sukabumi (menjadi hulu DAS Cimanjuri), sedangkan sisanya 33% terletak di wilayah Kabupaten Bogor (menjadi hulu DAS Cisadane dan Ciliwung) dan 15% di Kabupaten Cianjur (menjadi hulu DAS Citarum). Hal ini menyebabkan kawasan ini mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan bagi tidak kurang dari 30 juta orang masyarakat sekitar Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Sungai-sungai tersebut mengalirkan air per tahun $\pm$ 213 milyar liter.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Propinsi Jawa Barat skala 1:250.000 (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1966), jenis-jenis tanah yang mendominasi

kawasan TNGGP adalah latosol coklat, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat, kompleks regosol kelabu dan litosol, abu pasir, tuf, dan batuan vulkan intermedier sampai dengan basis. Curah hujan di kawasan TNGGP termasuk dalam Tipe A (Nilai Q = 5 – 9%) berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt – Ferguson. Curah hujan yang tinggi dengan rata-rata curah hujan tahunan 3.000 mm – 4.200 mm, menyebabkan kawasan ini merupakan salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa.

Menurut catatan vulkanologi, letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747, kemudian berturut-turut terjadi letusan pada tahun 1840, 1852, 1886, 1947 dan 1957. Akibat letusan-letusannya, kawasan TNGGP terdiri atas batuan vulkanik kuarter Gunung Pangrango dan batuan vulkanik tersier Gunung Gede. Batuan vulkanik Gunung Pangrango yaitu (a) formasi Qvpo (endapan tua, lahar dan lava, basal andesit dengan oligoklas – andesine, labradorit, olivine, piroksen dan horenbenda) yang menyebar pada bagian Utara, Barat Laut dan Barat Daya; dan (b) formasi Qvpy (endapan muda, lahar dan bersusunan andesit) pada bagian Barat. Batuan vulkanik Gunung Gede sebagian besar terdiri atas formasi Qvg (breksi tufaan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, tekstur seperti trakhit); formasi Qvgy (aliran lava termuda) dari puncak Gunung Gede ke arah Utara sepanjang kurang lebih 2,75 km; dan formasi Qvgl (aliran lava bersusunan andesit basal). Patahan dan sesar (fault) tidak dijumpai dalam kawasan TNGGP, tetapi daerah yang rawan bencana geologi karena terjadinya sesar (pergeseran batuan/formasi) dan patahan terdapat di sebelah Selatan Sukabumi dan Cibadak.

Tipe-tipe ekosistem di kawasan TNGGP dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu :

1. Ekosistem hutan pegunungan bawah (Sub Montana) pada ketinggian 1.000 mdpl - 1.500 mdpl;
2. Ekosistem hutan pegunungan atas (Montana) pada ketinggian 1.500 mdpl 2.400 mdpl dan;
3. Ekosistem sub-alpin pada ketinggian 2.400 mdpl - 3.019 mdpl.

Selain ketiga tipe ekosistem utama tersebut, ditemukan beberapa tipe ekosistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Ekosistem tersebut antara lain : (a) Ekosistem rawa; (b) ekosistem danau; dan (c) ekosistem hutan tanaman (perluasan). Pada umumnya tipe ekosistem hutan pegunungan bawah dan pegunungan atas dicirikan oleh keanekaragaman jenis vegetasi yang tinggi, dengan pohon-pohon besar dan tinggi yang membentuk tiga strata tajuk. Tinggi tajuk hutan di dalam kawasan TNGGP sekitar 30 m-40 m, dan strata tertinggi didominasi oleh jenis-jenis *Litsea* spp dan *Castanopsis* spp. Sedangkan Ekosistem Hutan Sub-alpin memiliki strata tajuk sederhana dan pendek yang disusun oleh jenis-jenis pohon kecil (kerdil), dengan tumbuhan bawah yang tidak terlalu rapat. Keanekaragaman jenis vegetasi pada tipe ekosistem sub alpin ini lebih rendah dibandingkan kedua tipe ekosistem lain.

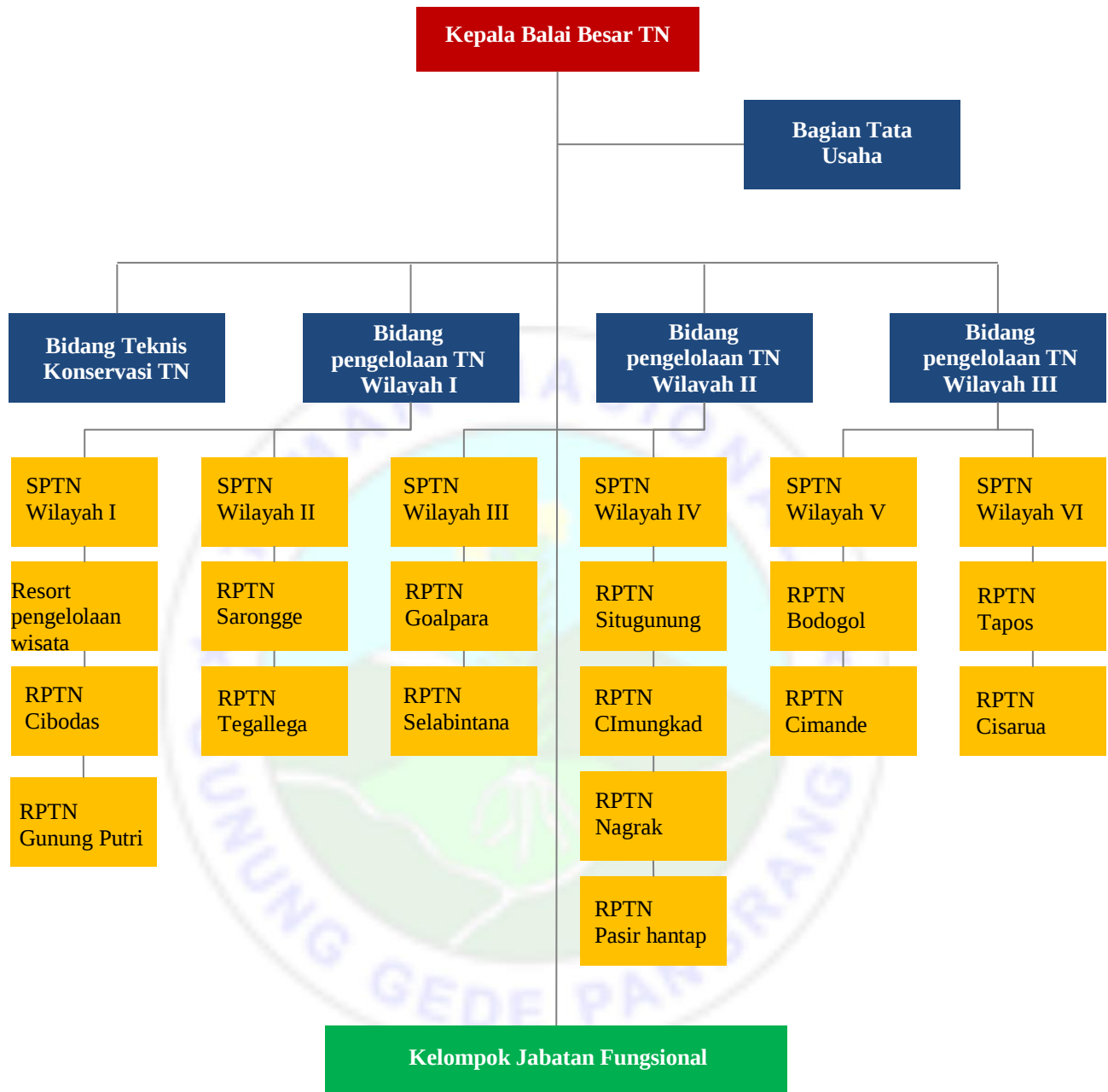
TNGGP dikelola Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem setingkat Eselon II yaitu Balai Besar TNGGP

yang berkedudukan di Cibodas. Sebagai salah satu Unit Pelaksana teknis (UPT) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, BBTNGGP memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Taman Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Taman Nasional memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
6. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
7. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
8. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
9. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
12. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
13. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
16. Pengelolaan kawasan taman nasional; dan
17. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Untuk efektifitas pengelolaan, TNGGP dibagi ke dalam 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah, yaitu Bidang PTN Wilayah I Cianjur di Cianjur, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi di Selabintana, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor di Caringin serta 6 (enam) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah dan 15 (lima belas) Resort pengelolaan Taman Nasional. Selain itu Balai Besar TNGGP juga membawahi Bagian Tata Usaha dan Bidang Teknis Konservasi

yang mendukung seluruh operasional kegiatan yang ada di Balai Besar TNGGP. Struktur Organisasi Balai Besar TNGGP dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 3 Struktur Organisasi BBTNGGP

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dikelola secara zonasi, dimana TNGGP menetapkan 7 (tujuh) zona dalam pengelolaannya, diantaranya adalah: (1) Zona inti dengan luas sebesar 10.460,20 Ha, (2) Zona rimba seluas 6.402,35 Ha, (3) Zona pemanfaatan seluas 3.539,72 Ha, (4) Zona rehabilitasi seluas 3.370,66 Ha, (5) Zona tradisional seluas 476,35 Ha, (6) Zona khusus seluas 20,17 Ha, dan (7) Zona religi, budaya, dan sejarah seluas 1,34 Ha. Secara ringkas, penentuan luasan

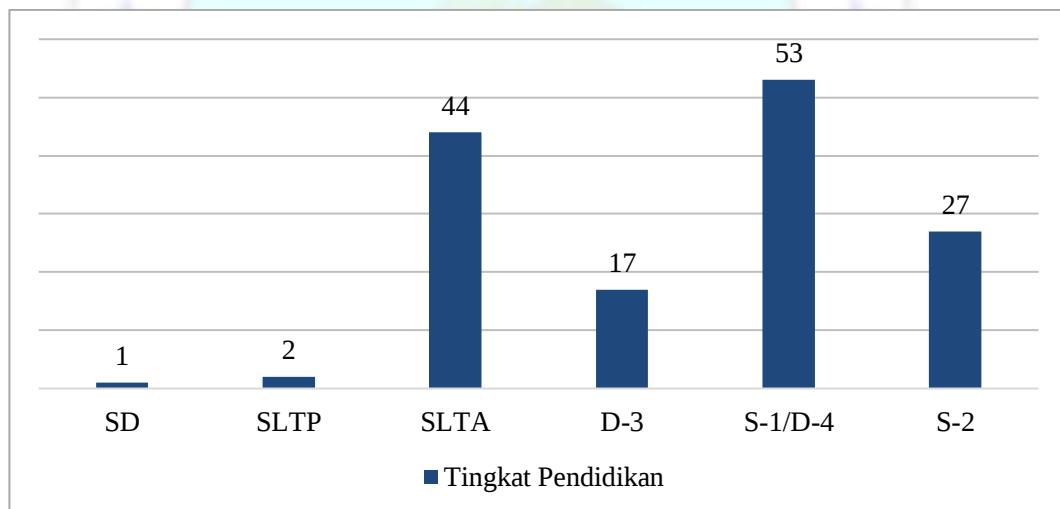
dan lokasi zonasi ini ditetapkan berdasarkan penilaian yang kompleks dengan mempertimbangkan kondisi langsung di lapangan.

TNGGP sebagai salah satu Balai Besar yang dikelola dengan sistem zonasi dalam tiga bidang wilayah, didukung dengan kekuatan sumber daya manusianya (SDM) yang terdiri dari 101 PNS dan 52 PPPK, sehingga jumlah total SDM yang ada di BBTNGGP adalah 153 pegawai. Berikut rincian SDM yang ada dalam pengelolaan BBTNGGP dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK):

Tabel 1 Analisis beban kerja

No	Jabatan	Jumlah		
		ABK	Eksisting	+/-
1	Struktural	12	12	0
2	Fungsional	312	123	-189
3	Pelaksana	60	18	-42
	Total	384	153	-231

Tingkat pendidikan SDM di BBTNGGP secara keseluruhan cukup beragam mulai dari sekolah dasar hingga strata-2. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, jumlah tingkat pendidikan tertinggi dari SDM yang ada di BBTNGGP adalah S-1/D-4 yaitu sebanyak 53 orang dan disusul oleh SLTA sebanyak 44 orang.



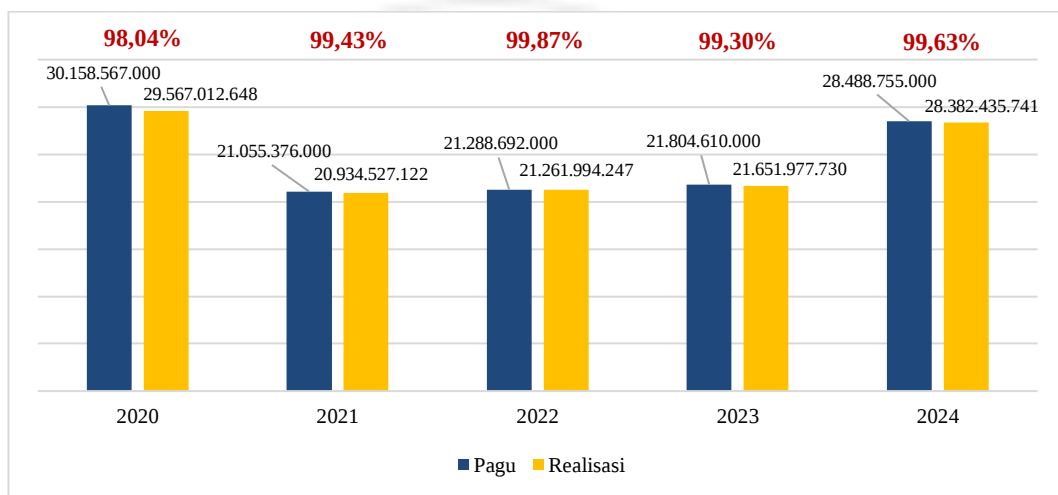
Gambar 4 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Melihat pemenuhan beban kerja yang masih kurang, tentunya jumlah SDM masih akan terus bertambah. Jumlah yang ada sekarang juga masih akan berkurang karena mutasi atau pensiun. Prognosis pegawai yang pensiun ada di tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) pegawai dan di tahun 2027 sebanyak 2 (dua) pegawai.

1.2 Capaian Kinerja

1.2.1 Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari tahun 2020 hingga 2024 relatif bervariasi. Diagram anggaran BBTNGGP Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah. Pada tahun 2020, BBTNGGP mendapat anggaran yang bersumber dari dana SBSN sehingga belanja modal pada tahun tersebut cukup tinggi. Realisasi anggaran BBTNGGP selama lima tahun terakhir bisa dikatakan stabil bahkan cenderung meningkat dengan capaian tiap tahunnya yang tidak pernah kurang dari 98%. Realisasi anggaran BBTNGGP Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 Kinerja anggaran BBTNGGP

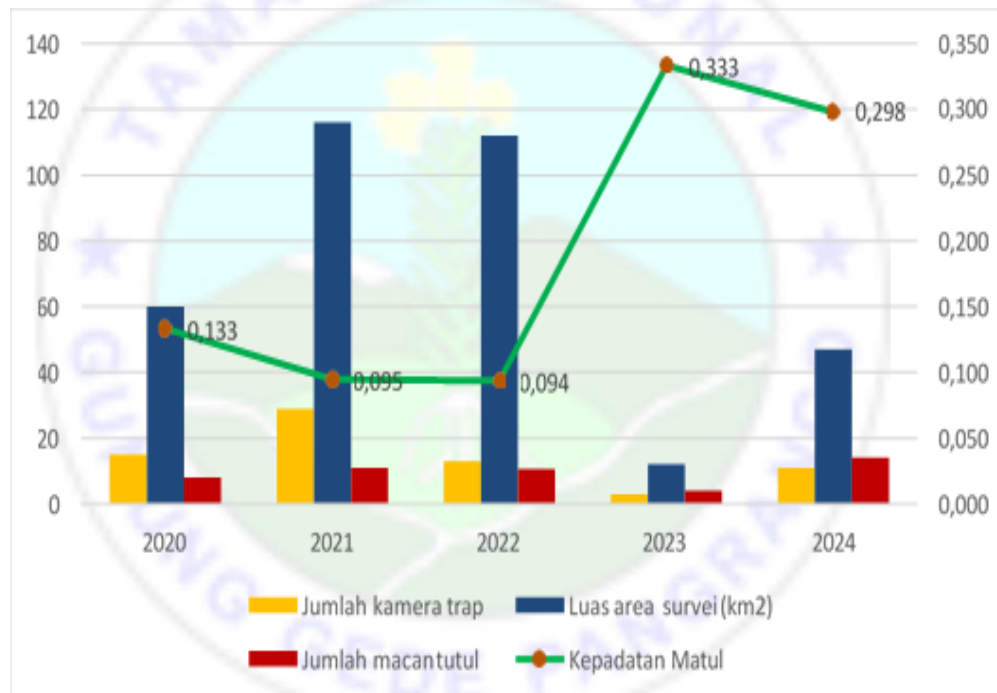
1.2.2 Kinerja Konservasi Spesies dan Genetik

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.180/IV-KKH/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan Dua Puluh Lima Satwa Terancam Punah Prioritas untuk Ditingkatkan Populasinya sebesar 10% pada tahun 2015-2019, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango memperoleh tugas untuk satwa Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), dan Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*). Ketiga satwa terancam punah prioritas tersebut dipantau perkembangan populasinya sejak tahun 2015 sampai 2019, yang masih dilanjutkan hingga tahun 2024.

a. Macan Tutul Jawa

Pemantauan populasi Macan tutul Jawa dilakukan terutama pada lokasi site monitoring yaitu Blok Jublegan pada Resor Tegalega dan Sarongge, Bidang PTN Wilayah I Cianjur seluas 2.720 hektar. Selain itu, pemantauan populasi juga dilakukan pada lokasi lain lingkup Bidang PTN Wilayah I Cianjur, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor. Berikut disampaikan tren hasil pemantauan Macan Tutul Jawa di TNGGP selama lima tahun terakhir.

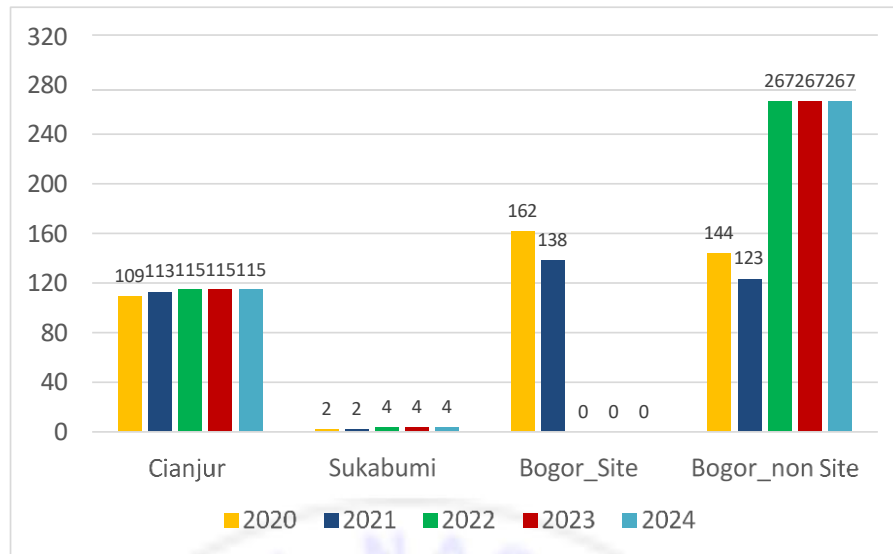
Gambar 6 dibawah ini memperlihatkan hasil monitoring Macan Tutul Jawa lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 - 2022 digunakan 13 sampai 29 kamera trap, sedangkan tahun 2023 digunakan 3 kamera trap. Oleh karenanya, perlu disampaikan tren kepadatan Macan Tutul Jawa (individu/km²) yang terlihat melalui garis hijau. Tren kepadatan tersebut memperlihatkan adanya fluktuatif (turun/naik) setiap tahunnya, dengan nilai 0,133 individu/km² pada tahun 2020 hingga 0,095 individu/km² di tahun 2021. Tahun 2024 kamera trap yang dipasang hanya 11 sehingga diperoleh nilai kepadatan 0,298 individu/km² dengan luas survei 47 km². Nilai tersebut berarti diperkirakan terdapat satu hingga dua individu Macan Tutul Jawa pada setiap 14 km² di TNGGP terutama di sekitar lokasi pengambilan data. Tren data kepadatan relatif stabil meskipun turun/ naik, hal tersebut menunjukkan kondisi populasi Macan Tutul Jawa di TN Gunung Gede Pangrango yang masih terjaga. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat enam sampai 24 individu Macan Tutul Jawa di TNGGP selama lima tahun terakhir.



Gambar 6 Tren hasil monitoring macan tutul jawa

b. Owa Jawa (*Hylobates moloch*)

Pemantauan populasi Owa Jawa dilakukan terutama pada lokasi site monitoring yaitu Resor Bodogol, Bidang PTN Wilayah III Bogor seluas 2.759 hektar. Selain itu, pemantauan populasi juga dilakukan pada lokasi non site monitoring lain lingkup Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cianjur, Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sukabumi dan Bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bogor. Berikut disampaikan tren hasil pemantauan Owa Jawa di TNGGP selama lima tahun terakhir.

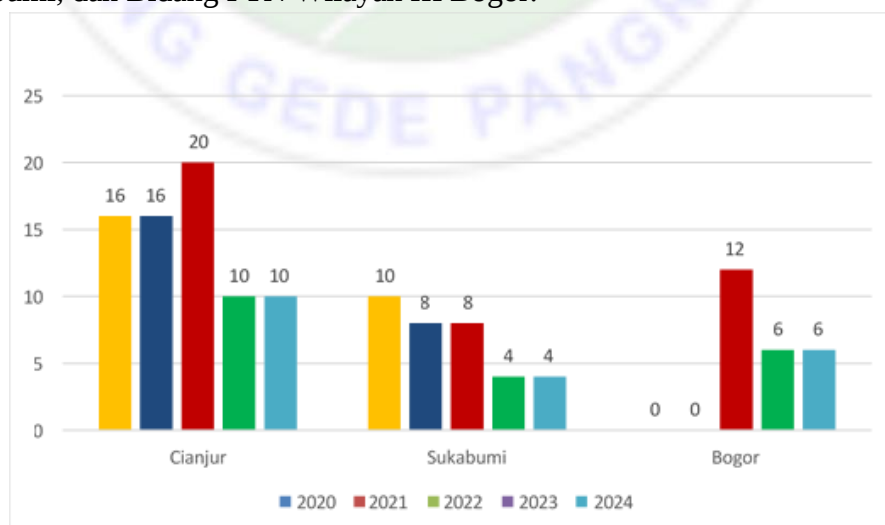


Gambar 7 Tren hasil monitoring Owa Jawa

Populasi Owa Jawa di sekitar lokasi pengambilan data Bidang PTN Wilayah I Cianjur diperkirakan antara 100 hingga 115 individu. Sedangkan di Bidang PTN Wilayah III Bogor pada lokasi site monitoring dan non site monitoring, masing-masing diperkirakan terdapat antara 80 hingga 267 individu Owa Jawa. Berdasarkan data di atas, diperkirakan terdapat 280 hingga 416 individu Owa Jawa di sekitar lokasi pengambilan data TN Gunung Gede Pangrango, selama lima tahun terakhir.

c. Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)

Pemantauan populasi Elang Jawa dilakukan terutama pada lokasi site monitoring yaitu Resor Situgung, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi seluas 3.477 hektar. Selain itu, pemantauan populasi juga dilakukan pada lokasi non site monitoring lain lingkup Bidang PTN Wilayah I Cianjur, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor.



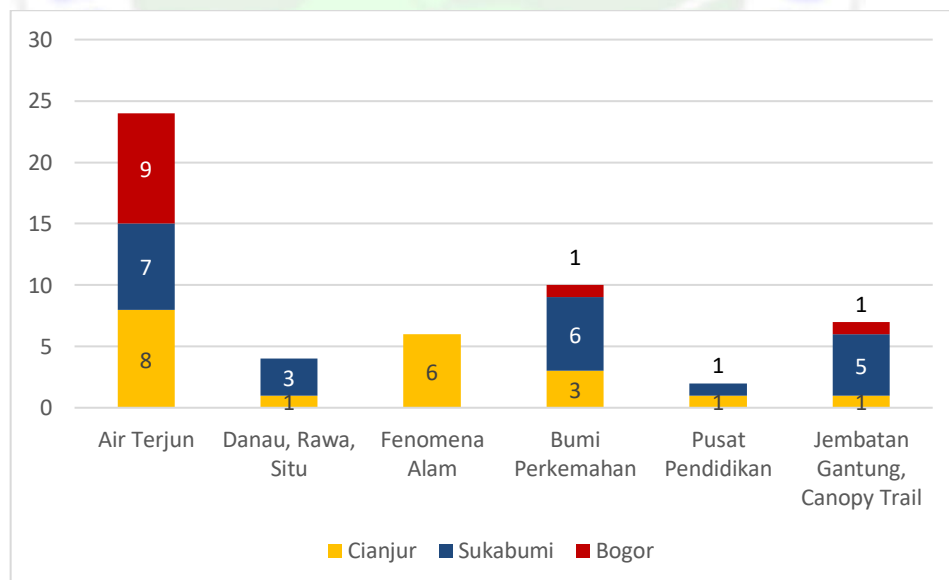
Gambar 8 Tren hasil monitoring Elang Jawa

. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 12 hingga 20 individu Elang Jawa di sekitar lokasi pengamatan lingkup Bidang PTN Wilayah I Cianjur, tujuh hingga 8 individu Elang Jawa di sekitar lokasi pengamatan lingkup Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan sembilan hingga 12 individu Elang Jawa di sekitar lokasi pengamatan lingkup Bidang PTN Wilayah III Bogor.

Potensi keanekaragaman hayati spesies dan genetik dalam kawasan TNGGP sangat tinggi. Terdapat banyak potensi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dapat dimanfaatkan, baik untuk komersial maupun non komersial. Dari sekian banyak spesies flora yang ada di TNGGP, terdapat 63 spesies yang memiliki potensi bioprospeksi. Lalu pada fauna, beberapa jenis juga memiliki potensi, seperti cacing sonari, monyet ekor panjang, dan trenggiling, namun perlu data-data lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan menjadi bioprospeksi. Saat ini potensi bioprospeksi yang sedang diuji adalah tumbuhan kicareuh, kisaheun, dan pakurane karena kandungan dalam tumbuhan ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker.

1.2.3 Kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berupa lanskap hutan hujan tropis pegunungan tentunya memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata alam yang besar tersebut perlu didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga potensi tersebut dapat menjadi pemantik peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Secara rinci, berikut potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang ada di TNGGP:

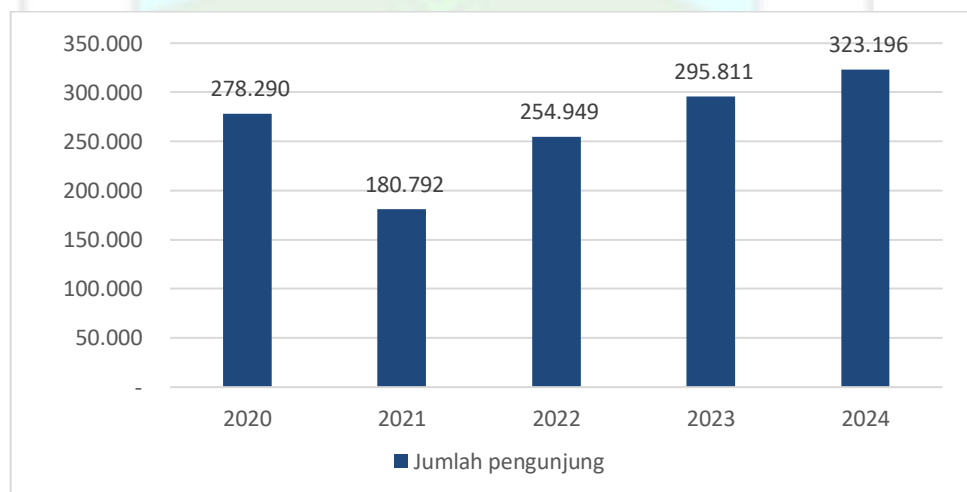


Gambar 9 Potensi ODTWA di TNGGP

Potensi paling tinggi yang ada di TNGGP adalah Air terjun atau curug, dimana di Kabupaten Cianjur terdapat 8 curug, Sukabumi 7 curug, dan Bogor 9

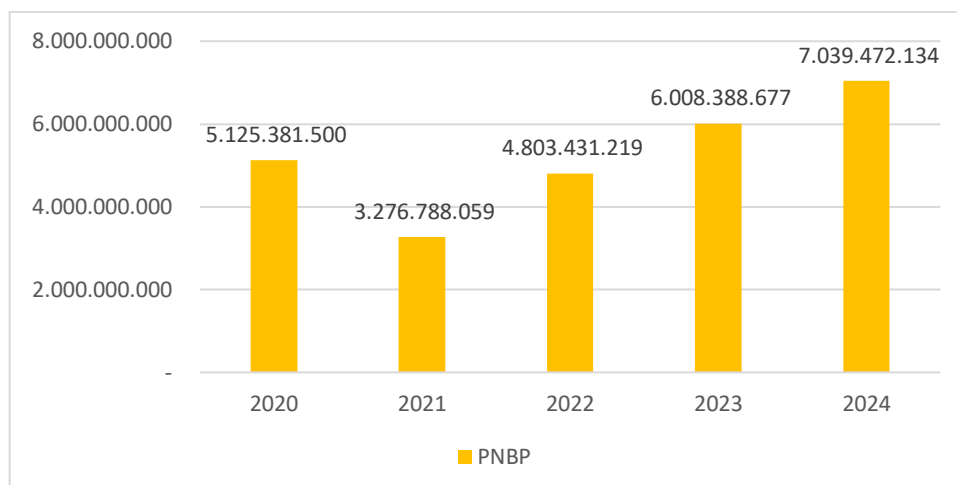
Curug. Potensi ODTWA ini masih belum semua dijadikan destinasi wisata alam yang berjalan secara optimal, perlu peninjauan dan perkembangan lebih lanjut untuk dapat mendatangkan wisatawan dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Ada empat danau di TNGGP dan sudah tiga yang menjadi destinasi andalan. Fenomena alam berupa puncak gunung gede dan pangrango, alun-alun sebagai habitat edelweiss, kawah, dan sumber air panas. Saat ini ada dua pusat pendidikan di TNGGP, yaitu Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB) di Bogor dan Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa (PPKEJ) di Sukabumi. Daya tarik wisata lain yang mampu mengundang wisatawan yaitu jembatan gantung dan canopy trail. Saat ini terdapat masing-masing satu buah canopy trail di Cianjur (Cibodas) dan Bogor (Bodogol), serta lima buah jembatan gantung (suspension bridge) di Sukabumi (Situgunung).

Dengan begitu banyaknya potensi ODTWA yang dimiliki TNGGP, jumlah pengunjung yang datang untuk berwisata sangat banyak. Selain untuk berwisata, pengunjung juga datang untuk kegiatan lain seperti penelitian, pelatihan, dan kegiatan lainnya. ODTWA yang mendatangkan pengunjung tentunya menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah pengunjung menurun hingga menjadi sebanyak 180.792 wisatawan saja baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dan jumlah PNBP pun menurun juga hingga Rp. 3.276.788.059. Jumlah pengunjung dan PNBP dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 10 Jumlah pengunjung dalam dan luar negeri

Meski sempat menurun di tahun 2020 dan 2021 karena wabah pandemi covid-19, jumlah pengunjung dan PNBP yang didapatkan baik dari wisata alam maupun kegiatan lain mulai kembali meningkat di tahun 2022, hingga pada tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah pengunjung yang tercatat mencapai 323.196 wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara dan PNBP yang didapat TNGGP sebesar Rp. 7.039.472.134.



Gambar 11 PNB dari kawasan TNGGP

Selain dari wisata dan penelitian, jasa lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk berusaha lewat skema perizinan. Ada dua tipe perizinan, yaitu Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) dan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA). Saat ini ada 9 perizinan yang sudah dikeluarkan untuk PB-PSWA dan 36 perizinan untuk PB-PJWA dan masih ada 34 permohonan perizinan berusaha yang masih diproses. Adanya usaha baik dari perusahaan/korporasi, koperasi, dan perorangan ini selain menjadi nilai tambah bagi pendapatan negara, tetapi juga diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah penyangga dan menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan.

1.2.4 Kinerja Pemulihan Ekosistem

Pemulihan ekosistem dalam kawasan TNGGP secara mekanisme alam biasanya dilakukan dengan patroli. Selain itu, pemulihan, restorasi, rehabilitasi dilakukan dengan penanaman intensif dan pemeliharaan. Tabel di bawah ini menunjukkan rencana luas kawasan yang dilakukan pemulihan beserta realisasinya selama lima tahun pada 15 Resor Pengelolaan Taman Nasional. Beberapa target tidak tercapai karena berbagai kendala, utamanya adalah keterbatasan anggaran akibat adanya efisiensi. Alternatif solusi dari adanya permasalahan anggaran adalah dengan melibatkan mitra kawasan untuk bekerja sama dalam memulihkan ekosistem kawasan TNGGP.

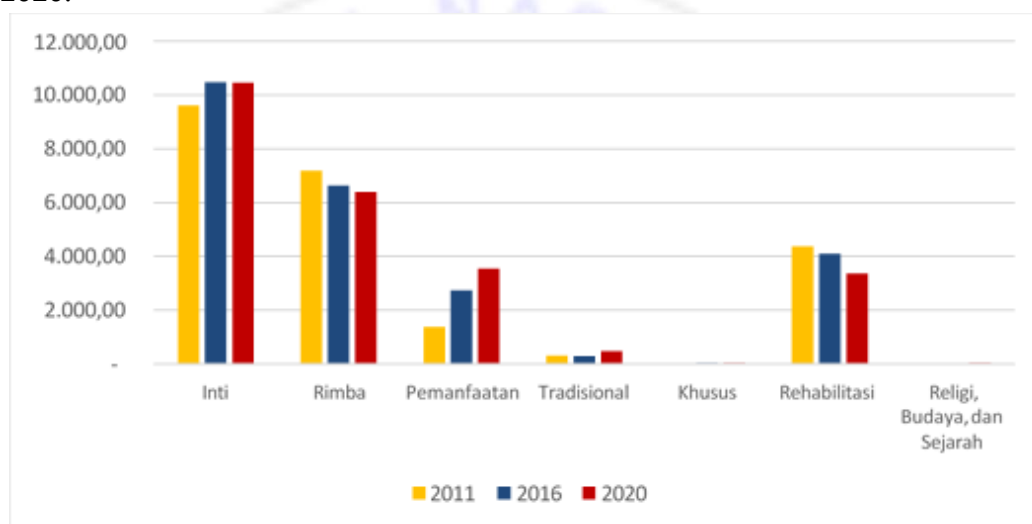
Tabel 2 Capaian pemulihan ekosistem BBTNGGP

Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	%
2020	103,12	103,71	100,57%
2021	114,94	65,41	56,91%
2022	132,72	64,6	48,67%
2023	128,05	101,39	79,18%
2024	125,6	11,08	8,82%
Total	604,43	346,19	57,28%

Berdasarkan tabel diatas, dari total rencana luasan ekosistem yang akan dipulihkan, yaitu seluas 604,43 hektar, realisasinya hanya tercapai 57,28% atau sebesar 346,19 hektar saja. Perlu ada penyesuaian target dengan ketersediaan sumber daya anggaran, waktu dan manusia.

1.2.5 Kinerja Perencanaan Pengelolaan

Taman nasional dikelola secara zonasi yang tentunya memerlukan perencanaan dalam penentuan zonasinya. Kondisi tapak yang berbeda-beda dan kebutuhan yang beragam menjadi latar belakang dalam penentuan zonasi di kawasan TNGGP. Sebelumnya sudah ada zonasi di kawasan TNGGP yang mengalami dinamika perubahan pada tahun 2011, 2016, dan terakhir pada tahun 2020.

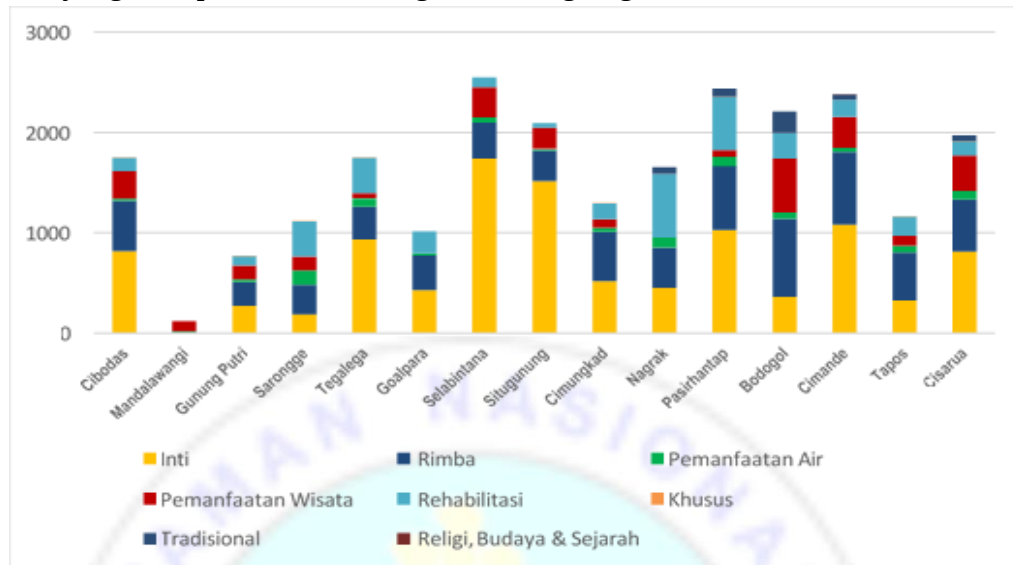


Gambar 12 Perkembangan luas zonasi kawasan TNGGP

Tabel 3 Perkembangan luasan zonasi kawasan TNGGP

No.	Zona	Luas (hektar)		
		2011	2016	2020
1	Inti	9,612.59	10,475.57	10,460.20
2	Rimba	7,175.40	6,628.49	6,402.35
3	Pemanfaatan	1,380.52	2,745.69	3,539.72
4	Tradisional	312.14	297.17	476.35
5	Khusus	3.19	23.67	20.17
6	Rehabilitasi	4,367.19	4,100.21	3,370.66
7	Religi, Budaya, dan Sejarah			1.34
	Jumlah	22,851.03	24,270.80	24,270.80

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada masing-masing Bidang PTN Wilayah dibantu dengan dua Seksi PTN Wilayah serta 15 resor yang membagi habis TNGGP. Berikut disampaikan luas masing-masing zona pada 15 resor yang terdapat di TN Gunung Gede Pangrango.



Gambar 13 Zonasi kawasan TNGGP per resor

Dalam perencanaan pengelolaan di kawasan konservasi, BBTNGGP melibatkan *stakeholder* yang berkaitan langsung dengan kawasan. Diantaranya perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, dan tentunya masyarakat di sekitar kawasan, dimana beberapa masyarakat tersebut tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadi binaan BBTNGGP. Pelibatan para pihak ini dilakukan dengan skema kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU), dan Memorandum Saling Pengertian (MSP). Kerja sama ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya kerja sama penguatan fungsi, pembangunan strategis, kemitraan konservasi, dan pemberian akses HHBK. Hingga saat ini terdapat delapan kerja sama aktif dengan perusahaan/organisasi, dan 15 kerja sama dengan KTH.

1.2.6 Kinerja Konservasi Kawasan

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan bentuk lanskap yang menjari dan berbatasan langsung dengan wilayah aktivitas masyarakat sekitar, menjadikan aksesnya terbuka pada hampir seluruh batas kawasan. Kondisi ini tentunya berpotensi masuknya masyarakat ke dalam kawasan dan menimbulkan terjadinya gangguan keamanan kawasan, misalnya pengambilan sumber daya maupun melakukan aktivitas lainnya tanpa izin. Kayu bakar menjadi salah satu potensi yang paling sering diambil oleh masyarakat sekitar dengan satuan batang, ikat, atau pikul. Perambahan kawasan berupa penggarapan kebun sayur dan sawah

oleh masyarakat cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 4 Tren gangguan kawasan TNGGP

Temuan/Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penggarapan dan Pemukiman Liar (hektar)	532,4	532,4	± 718,2	± 718,3	± 718,4
Perburuan Liar (ekor)	13	11	4	0	0
Pencurian Kayu/Penebangan Liar (pohon/tu ggak/batang)	34	0	27	24	21
Pengambilan kayu bakar (ikat/pikul)	19	33	64	27	4
Pengambilan kayu bakar/bambu (batang)	63	808	23	36	0
Pengambilan kulit kayu manis (kg)	40	40	0	0	0
Pengambilan tumbuhan hias (individu)	12	0	0	0	0

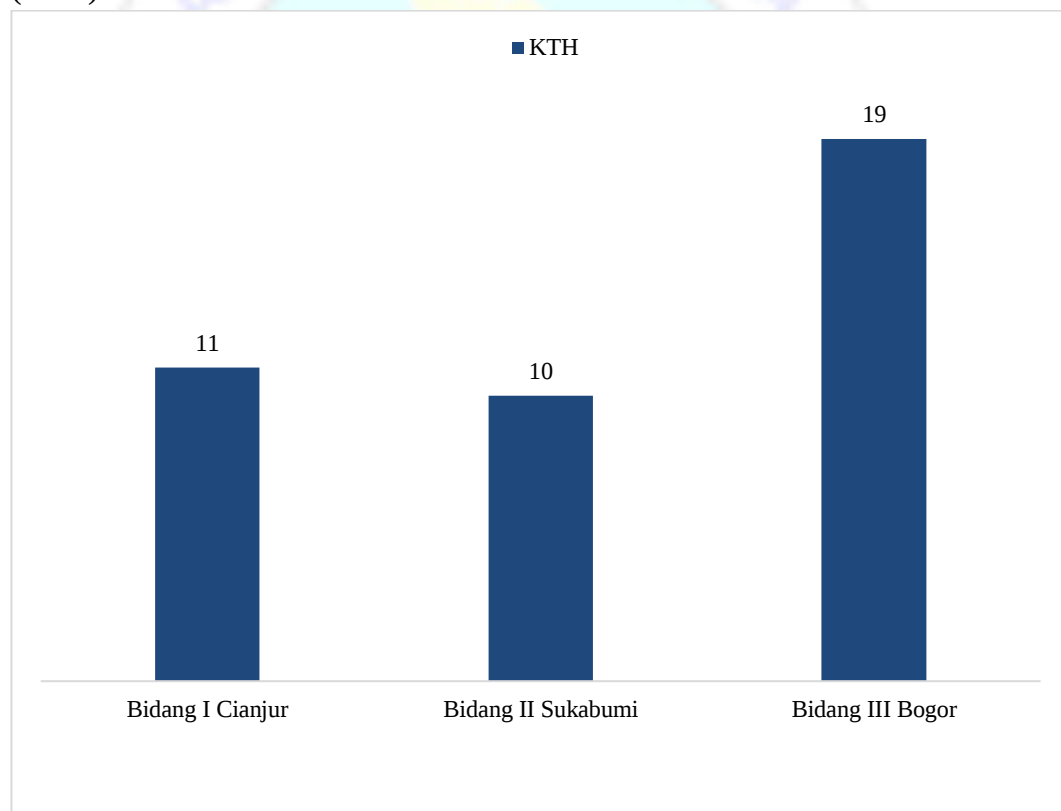
Beberapa gangguan yang terjadi dalam kawasan TNGGP, khususnya terkait pengambilan potensi sumber daya alam dan penggarapan kawasan selama lima tahun terakhir terutama luasan penggarapan lahan oleh masyarakat selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari 532,36 hektar pada tahun 2020 menjadi 718,20 hektar pada tahun 2024 (data open area berdasarkan on desk e- reporting). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih untuk penanganannya.

Gangguan keamanan kedua yaitu perburuan liar berupa pengambilan burung yang berkisar antara empat hingga 13 ekor setiap tahunnya. Jumlah burung yang diambil relatif stabil, dengan kecenderungan menurun. Gangguan keamanan selanjutnya yaitu penebangan liar berupa penebangan kayu dalam bentuk pohon, tunggak, atau batang pohon, dengan jumlah yang relatif stabil setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 lalu yang tidak dijumpai masyarakat yang melakukan aktivitas ilegal tersebut. Pengambilan kayu lainnya yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar terjadi setiap tahunnya. Kayu bakar tersebut diambil dalam satuan pikul, ikat, atau batang. Jumlah kayu bakar yang diambil dalam satuan pikul atau ikat cenderung menurun, dari 34 ikat atau pikul pada tahun 2020 menjadi 21 ikat pada tahun 2024. Namun terjadi penurunan signifikan pada jumlah kayu bakar yang diambil masyarakat dalam satuan batang pada tahun 2024. Pada tahun sebelumnya (2020-2023), pengambilan kayu bakar berkisar antara 19 hingga 33 batang, namun meningkat menjadi 64-an batang pada tahun 2022. Sekitar 808 batang kayu bakar yang diambil pada tahun 2021 tersebut berupa kayu kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dengan diameter sekitar kurang dari 10 cm. Sedangkan pada tahun 2024

luas Garapan masih relative sama yaitu 718,20 Ha dengan perburuan liar 0 kali, pencurian kayu 21 batang, kayu bakar 4 ikat/pikul dan bambu/kayu sebanyak 0 batang.

Gangguan yang terjadi sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan dan keterlibatan masyarakat terhadap konservasi kawasan. Beberapa masyarakat sudah terlibat melalui baik melalui program BBTNGGP maupun voluntary atau sukarela, beberapa masyarakat ini tergabung dalam kelompok, diantaranya adalah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Jumlah kader konservasi BBTNGGP saat ini berjumlah 50 orang, dengan sebaran 30 kader di Bidang PTN Wilayah I Cianjur, 14 kader di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan 6 kader di Bidang PTN Wilayah III Bogor. Data tersebut sudah menghitung siswa binaan yang tergabung dalam *Green Youth Movement (GYM)*.

Selain kelompok masyarakat yang secara sukarela berkontribusi dalam konservasi kawasan, terdapat kelompok masyarakat yang secara profesi berkaitan dengan kawasan dan merupakan binaan BBTNGGP, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH).



Gambar 14 Sebaran KTH pada tiap Bidang Wilayah TNGGP

Saat ini KTH yang ada di TNGGP berjumlah 40 kelompok dan tersebar pada tiga bidang wilayah, diantaranya 11 KTH di Bidang PTN Wilayah I Cianjur, 10 KTH di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan 9 KTH di Bidang PTN Wilayah III Bogor.

1.3 Potensi dan Tantangan

1.3.1 Potensi Keanekaragaman Hayati

Kawasan TNGGP dengan berbagai ekosistem yang terdapat di dalamnya menyediakan habitat bagi keanekaragaman fauna, termasuk satwa langka dilindungi. Jenis-jenis satwa langka yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain primata, yaitu Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Trachypithecus auratus*) serta pemangsa seperti Macan Tutul (*Panthera pardus*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Kucing Akar (*Mustela flavigula*) dan Anjing Hutan (*Cuon alpinus javanicus*). Disamping itu terdapat pula jenis satwa lainnya seperti Sigung (*Mydaus javanensis*), Kijang (*Muntiacus muntjak*) dan Kancil (*Tragulus javanicus*). Jenis burung (*Aves*) yang tercatat ditemukan di kawasan ini sebanyak 260 jenis (lebih dari 50% dari jenis burung yang hidup di Jawa), yang terdiri dari 19 jenis dari 21 jenis burung yang endemik Pulau Jawa (termasuk Bali), 58 jenis burung yang dilindungi, 2 jenis burung berstatus agak jarang dijumpai, 34 jenis burung berstatus jarang dijumpai, dan satu jenis yang sangat jarang dijumpai. Tiga jenis burung yang memiliki status endemik sekaligus jarang ditemukan dan dilindungi, yaitu: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Celepuk Gunung (*Otus angelinae*), dan Cerecet (*Psaltia exilis*). Selain itu, jenis burung langka dan menarik lainnya yang dapat dijumpai di kawasan ini antara lain burung luntur gunung (*Harpactes reinwardtii*), burung tulung tumpuk (*Megalaema corvina*), burung kuda (*Garrulax rufifrons*), dan burung madu gunung (*Aethopyga eximia*). Pada kawasan ini juga dapat ditemukan jenis-jenis reptilia sebanyak 75 jenis, katak sebanyak 21 jenis, serangga (*Insecta*) lebih dari 300 jenis, dan ditemukan pula berbagai jenis binatang lunak (*Molusca*).

1.3.2 Potensi Jasa Lingkungan

Kawasan TNGGP memiliki aneka keindahan alam yang berpotensi menjadi objek dan daya tarik wisata alam diantaranya berupa air terjun, air panas, goa, bumi perkemahan, jalur pendakian dengan pucak Gunung Gede dan Gunung Pangrango, danau dan keindahan bentang alam serta keanekaragaman hayati. Potensi serapan karbon sampai saat ini baru didapatkan melalui 3 (tiga) penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2007), Widjayanto et al. (2009 – 2010) dan Rahajoe, JS., et al. (2011). Hasil penelitian Siregar (2007) menunjukkan bahwa TNGGP memiliki potensi biomassa sebesar 551,12 ton/ha, kandungan karbon biomassa sebesar 275,56 ton/ha dan kandungan setara CO sebesar 21.010,38 ton/ha. Jenis-jenis *Castanopsis argentea* dan *Altingia excelsa* menyimpan karbon tertinggi masing-masing sebesar 70,39 ton/ha dan 54,67 ton/ha (Siregar 2007). Penelitian dua tahun yang dilakukan oleh Widjayanto et al. (2009 – 2010) dari Kebun Raya Cibodas – LIPI menemukan 122 species tumbuhan berkayu pada plot-plot karbon di ekosistem TNGGP yang diduga berpotensi tinggi dalam penyerapan karbon dalam biomasnya; Beberapa species asli yang dominan di TNGGP diketahui memiliki

nilai stok karbon tersimpan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 70,36 – 591,64 ton C/hektar dihitung berdasarkan persamaan Brown (1997) dan sebesar 60,84 – 316,20 ton C/hektar dihitung berdasarkan persamaan Ketterings et al. (2001), yaitu *Vaccinium varingiifolium*, *Leptospermum javanicum*, *Schima wallichii*, *Altingia excelsa*, dan *Castanopsis acuminatissima*. Widjayanto et al. (2009 – 2010) juga menyatakan bahwa hasil pengukuran rata-rata stok karbon tersimpan pada tipe ekosistem hutan alam TNGGP adalah sebesar 276,50 ton C/hektar, sedangkan nilai rata-rata biomassa diketahui sebesar 600,92 ton/hektar dengan variasi antara 410,28 ton/hektar sampai dengan 847 ton/hektar.

1.3.3 Potensi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Bioprospeksi

Berdasarkan hasil inventarisasi fauna yang dilakukan oleh Balai Besar TNGGP, didapatkan kelas mamalia sebanyak 27 jenis yang terdiri atas mamalia besar, mamalia sedang, dan mamalia kecil. Burung sebanyak 256 jenis. Kelas reptil sebanyak 11 jenis yang terdiri atas ular dan bunglon. Kelas amphibi sebanyak 19 jenis yang terdiri dari katak, dan kodok. Sampai saat ini, TNGGP menjadi salah satu habitat terbaik untuk 3 satwa liar prioritas terancam punah yaitu Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) dan Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*).

Berdasarkan hasil penelitian Yunghun mulai tahun 1843, Flora yang tumbuh di TNGGP terdiri atas lumut > 120 species, tumbuhan berbunga > 1500 species, tumbuhan obat > 300 species, Paku-pakuan > 400 species. Salah satu flora yang endemik tumbuh di TNGGP adalah bunga raflesia kerdil (*Rafflesia rochusinni*) dan lumut merah (*Sphagnum gedeanum*). Berdasarkan kompilasi hasil inventarisasi yang dilakukan Balai Besar TNGGP yaitu berbagai penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi dan LIPI, diperoleh jumlah jenis flora yang tumbuh di TNGGP sebanyak 925 jenis, 412 diantaranya merupakan jenis pohon dan 199 jenis diantaranya merupakan jenis anggrek. TNGGP juga memiliki potensi bioprospecting yaitu flora sebanyak 153 spesies (BPPT/BRIN 2018) dan fauna yaitu cacing sonari, monyet ekor panjang, dan Tringgiling.

1.3.4 Tantangan Sebagai Pusat Pendakian dan Wisata Alam

Menjadi destinasi pendakian dan wisata alam favorit di Jawa Barat dengan jumlah pengunjung yang selalu membludak tentunya menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Setiap ODTWA (Objek dan Daya Tarik Wisata Alam) yang ada dalam kawasan TNGGP perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Setiap detail perlu diperhatikan, seperti kapasitas pengunjung, sarana prasarana, dan tata kelola wisata, sehingga setiap pengunjung dapat merasa aman dan nyaman. Selain itu, dengan adanya pengelolaan ODTWA yang baik dapat mengantisipasi dampak negatif baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologi.

Adanya pengunjung pada wisata baik pendakian dan non pendakian pastinya menimbulkan resiko, karenanya rencana mitigasi risiko sangat diperlukan. Adanya fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan yang baik dapat meminimalisir risiko seperti timbulnya sampah, kecelakaan, dan bahkan bencana alam. Segala upaya ini perlu diiringi dengan kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai aktor yang dekat dengan upaya pemanfaatan kawasan, sehingga kedepannya pengelolaan ODTWA akan lebih baik dan dapat mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

1.3.5 Tantangan Sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati

Beberapa tantangan TNGGP sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi yang harus dijaga keseimbangannya adalah adanya spesies invasif baik asli maupun asing yang dapat mengancam ekosistem asli TNGGP. Selain itu, adanya konflik antara manusia dengan satwa juga menjadi tantangan yang harus diatasi meskipun intensitasnya masih relatif kecil. Hal ini dapat menjadi indikator ketersediaan pakan dan perubahan lahan dalam kawasan, oleh karenanya, perlu upaya dari BBTNGGP sebagai pengelola dan juga Daerah Penyangga Kawasan. Keanekaragaman hayati yang tinggi juga menyebabkan adanya risiko perburuan liar terutama yang sering terjadi adalah perburuan burung-burung yang dilindungi.

1.3.6 Tantangan Sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat

Sejak dahulu, masyarakat selalu bergantung pada alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri tetapi bisa dikendalikan. Tantangan TNGGP sebagai pusat kehidupan masyarakat adalah adanya penggarapan kawasan hutan akibat kurangnya kemantapan kawasan dan akses manfaat yang dirasakan masyarakat masih terbatas. Meskipun sudah banyak upaya untuk mengatasi hal tersebut, penggarapan lahan kawasan masih menjadi isu strategis karena masih terjadi walaupun sudah ada pendekatan dan kolaborasi kemitraan bersama masyarakat seperti adanya masyarakat binaan melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan skema bantuan usaha ekonomi produktif agar masyarakat yang menggarap lahan dalam kawasan dapat berangsur-angsur beralih usaha. Tentunya upaya ini harus dilakukan bersama, tidak hanya kebijakan *top to down* tetapi juga *bottom to up* yang inklusif dan melibatkan seluruh *stakeholders*.

II VISI DAN MISI

2.1 Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

2.1.1 Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai **“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, serta learning and growth.



Gambar 15 Peta strategi pembangunan kehutanan 2025-2029

Peta strategi disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Melalui peta strategi ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan

dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategi ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategi tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.2 Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan pernyataan Misi Kementerian Kehutanan.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3 Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran- sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

2.1.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (*Red List Index*);
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*).

Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik ungkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair *et al* (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi “**Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial**”. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi pada Gambar 23 tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process* serta *learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi

tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik



Peta strategi pembangunan KSDAE tahun 2025-2029

2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur. Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk

mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
Sasaran Strategis 1: Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
	Indeks Daftar Merah Nasional	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin
	Status Keterancaman Spesies						
Tujuan 2: Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
Tujuan 3: Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
Sasaran Strategis 4: Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing- masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing- masing Unit Kerja

Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red Lis	Spesies (Kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3 : Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai Ekspor TSL dan Bioprospecting	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

2.4 Visi dan Misi BBTN Gunung Gede Pangrango

2.4.1 Visi BBTN Gunung Gede Pangrango

Meneruskan mandat Kementerian Kehutanan yang menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” yang kemudian diinternalisasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan visinya “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”, maka Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di tingkat tapak ikut berkontribusi dengan mendukung visi Kementerian Kehutan dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui visi BBTNGGP, yaitu **“Peningkatan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dari Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Hutan Hujan Tropis”**. Visi ini mengandung tekad bahwa pengelolaan TNGGP harus menghasilkan manfaat nyata yang lebih tinggi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip dasar kelestarian hutan hujan tropis pegunungan sebagai ekosistem unik di Provinsi Jawa Barat.

2.4.2 Misi BBTN Gunung Gede Pangrango

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi-misi Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memulihkan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai sistem penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian konservasi;
2. Mempertahankan dan melindungi populasi flora dan fauna beserta habitat alamnya di dalam kawasan TNGGP agar terhindar dari kepunahan dan mencegah adanya konflik;
3. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan jasa lingkungan secara lestari dalam kerangka Cagar Biosfer Cibodas, sehingga fungsi taman nasional dapat mendukung pembangunan wilayah dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar.

Misi pertama menekankan fungsi perlindungan kawasan dan keutuhan ekosistem, misi kedua berfokus pada upaya pengawetan spesies langka, dan misi ketiga mengarahkan pemanfaatan yang bijaksana untuk kemakmuran rakyat. Ketiga misi ini saling melengkapi dalam kerangka *sustainable development* di lingkup TNGGP.

2.5 Identifikasi Risiko Target Kinerja

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah-langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar apa yang direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE beserta upaya mitigasinya.

1. Sasaran kegiatan “Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik”, risiko yang mungkin timbul adalah tidak teridentifikasinya spesies secara menyeluruh di dalam karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki petugas khususnya Pengendali Ekosistem Hutan dalam melakukan monitoring. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan perencanaan yang matang dan pembagian petugas berdasarkan bidang wilayah dan habitat satwa selama jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan supaya sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bisa mencapai target yang ditentukan. Selain itu, agar identifikasi dilakukan secara tepat hingga ke tingkat spesies dan dapat menjangkau kawasan lebih luas, biasanya melibatkan para pihak tertentu seperti masyarakat dan tenaga ahli.
2. Sasaran kegiatan “Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem” risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran kegiatan ini antara lain

keterlambatan penyusunan RPP dan RKT kerjasama setelah PKS ditandatangani. Untuk mengatasi hal ini perlu mendorong pihak kedua untuk segera menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kerjasama.

3. Sasaran kegiatan “Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi”. Risiko yang mungkin terjadi pada pencapaian sasaran kegiatan ini antara lain keberhasilan penanaman yang masih rendah dan jumlah pencapaian yang masih kurang dari target. Kendala yang terjadi adalah karena adanya efisiensi anggaran yang memangkas sebagian besar anggaran penanaman dan pemeliharaan, sehingga capaian yang didapat masih kurang dari target yang sudah ditentukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu adanya kerja sama dengan mitra kawasan agar berperan untung “*filling the gap*” dalam kebutuhan anggaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat tetap berjalan meskipun tidak ada anggaran yang bersumber dari dana APBN. Tantangan dalam bina areal preservasi adalah konsep dan kerangka kerja areal preservasi yang masih baru, sehingga perlu dipahami dan disusun rencana yang sesuai oleh para pihak termasuk petugas TNGGP.
4. Sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB”. Risiko yang biasanya terjadi pada pencapaian sasaran kegiatan ini adalah keterbatasan anggaran untuk antisipasi dan penanganan kasus pelanggaran kehutanan seperti kegiatan patroli. Untuk mengatasi hal tersebut perlu menjalin koordinasi dengan pihak terkait seperti APH (Aparat Penegak Hukum) dan masyarakat setempat. Hal ini juga untuk mengatasi keterbatasan SDM Polisi Kehutanan yang tersebar di tiga Bidang Wilayah PTN Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.
5. Sasaran kegiatan “Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati”. Kemungkinan risiko yang timbul pada pencapaian sasaran kegiatan ini antara lain fasilitasi yang diberikan tidak memberikan dampak positif, yaitu masyarakat mau terlibat dalam upaya konservasi serta usaha kelompok namun hal tersebut tidak membuahkan hasil (tidak berkembang sebagaimana mestinya). Upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah pendampingan intensif oleh penyuluh kehutanan dan pengawasan oleh kepala resor dan pemberian sanksi kepada kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan fasilitas dari TNGGP namun masih berperilaku merusak kawasan.
6. Sasaran kegiatan “Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi Masyarakat”. Risiko yang mungkin terjadi pada pencapaian sasaran kegiatan ini antara lain timbulnya konflik antar kelompok masyarakat pemanfaat jasa wisata alam yang disebabkan oleh kecemburuan sosial, konflik antara masyarakat yang berizin dan tidak berizin, adanya kelompok

masyarakat yang menghendaki PBPJWA atas nama kelompok bukan perorangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka mitigasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pendampingan kepada seluruh kelompok masyarakat pemanfaat jasa lingkungan, memberikan perlakuan yang berbeda bagi pemegang izin dan non pemegang izin, melakukan sosialisasi terkait peraturan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

7. Sasaran kegiatan “Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan”. Risiko yang mungkin timbul pada pencapaian sasaran kegiatan ini antara lain pemanfaatan produk bioprospeksi yang sulit diimplementasikan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Mitigasi risiko yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi jenis-jenis produk bioprospeksi yang mudah dikerjakan dalam skala *home industry*, memilih jenis produk yang dapat dikembangkan di masyarakat, menjadikan species yang menjadi bahan baku produk sebagai tanaman pokok di zona rehabilitasi sehingga bahan baku mudah didapat dari zona rehabilitasi. Ketersediaan bahan baku di zona rehabilitasi akan menjaga keberadaan species di dalam kawasan khususnya di zona inti dan zona rimba.
8. Sasaran kegiatan “Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan”. Target PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan memiliki risiko tidak tercapai karena *lost PNPB*, yang disebabkan oleh adanya wisatawan ataupun *event organizer* tidak tertib dalam membayar tarif masuk kawasan TNGGP sebagaimana mestinya. Risiko ini dapat diantisipasi dengan penerapan SOP pemeriksaan tiket pengunjung dan pengawasan bertingkat khususnya untuk pengunjung pendakian. Wisatawan yang akan melakukan pendakian perlu diperiksa secara *pack in pack out* yang dilakukan sebelum dan sesudah melakukan pendakian, sehingga dapat dipastikan bahwa semua pengunjung sudah membayar tiket masuk. Selain itu penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment* dilakukan untuk meminimalisir *potential loss* PNPB dari destinasi wisata alam yang ada dalam kawasan TNGGP.

2.6 Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan UPT dari Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi bagian dari Kementerian Kehutanan. Capaian kinerja Balai TNGGP secara sekuensial serta berjenjang mengikuti target capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, sedangkan capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE mengikuti capaian kinerja Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025 – 2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2025: Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan

yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;

- Tahun 2026: Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
- Tahun 2027: Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan;
- Tahun 2028: Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan Lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat;
- Tahun 2029: Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025- 2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025- 2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan

Dalam pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur. Sasaran pembangunan nasional 2025- 2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan Gross National Income (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat Global Power Index pada

angka 29; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan:

(1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan

serta kebijakan fiskal dan moneter pro-growth. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau.

Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat "memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas", dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.

Prioritas Nasional keenam "membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan "Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi,

keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1) peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025- 2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan.

Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan hutan sebagai paru- paru dunia dan pengatur tata air.** Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.
2. **Penguasaan hutan yang berkeadilan.** Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c)

audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. **Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.** Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk food estate (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. **One Map Policy.** Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.
5. **Digitalisasi layanan kehutanan.** Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandarisasi; serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioethanol.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Intervensi Ditjen KSDAE dalam pencapaian pembangunan nasional

No	Indikator Kinerja Kemenhut	Indikator Kinerja Ditjen KSDAE
Prioritas Nasional 2: Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
1	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sebanyak 50 spesies.
		Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List sebanyak 50 spesies
2	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting sebesar Rp. 8,4 Triliun
3	Nilai PNBPFungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun	Nilai PNBPF dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
1	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.

Indonesia merupakan salah satu negara Megabiodiversity yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdata sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alamnya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data Global Biodiversity Index (GBI), Indonesia menempati urutan kedua dalam The Most (& Least) Biodiverse Countries, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022). Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data IUCN Red List, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu

Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar *Key Biodiversity Area* dan *Important Bird Area* di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi.

Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber- sumber penghidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan

beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), Agricultural Land per Capita di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (30 by 30), sebagaimana target Global Biodiversity Framework 2030 (KM-GBF). Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema OECM (Other Effective Area-based Conservation Measures), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECM tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.

3. Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework).

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan Management Effectiveness Tracking Tool (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.

4. Pemanfaatan SMART, Grid Design System, dan IPM.

Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) serta *Integrated Prevention Model* (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat

ini sedang mematangkan rancangan *Grid Design System* untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan *Grid Design System*, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upaya antisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang *clumping*.

5. Area terbuka pada kawasan konservasi.

Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil desktop analysis. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.

6. Efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (*edge effect*). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.

7. Devisa dan PNPB dari pemanfaatan TSL.

Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat

ini, Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNBP, tarif PNBP serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNBP lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES stamp, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.

8. Kinerja PB-PSWA.

Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja “BURUK” dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PB-PSWA mendapatkan SP Pertama.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PB-PSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PB-PSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNBP pendapatan hasil usaha (PHU-PSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja “Baik”; (b) Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi “Pencabutan Izin”; serta (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif Iuran PB-PSWA.

9. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal.

Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali

pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi paska pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBP Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNBP Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD).

Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi BBTN Gunung Gede Pangrango

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai salah satu UPT dari Direktorat Jenderal KSDAE memiliki peran penting sebagai penyambung kinerja hingga ke tingkat tapak yang bermuara dari tingkat Kementerian. Dalam perjalanannya, BBTNGGP mengintervensi kinerja Ditjen KSDAE pada beberapa indikator kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6 Indikator Kinerja BBTNGGP

No	Indikator Kinerja Kemenhut	Indikator Kinerja Ditjen KSDAE	Indikator Kinerja BBTNGGP
Prioritas Nasional 2: Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sebanyak 50 spesies.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya
		Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List sebanyak 50 spesies	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB
			Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
			Luas Areal Preservasi yang dikembangkan
			Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB
			Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif
2	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting sebesar Rp. 8,4 Triliun	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi
3	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment
			Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
4	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati

			Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan
--	--	--	---



IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada sembilan dari 22 indikator kinerja Kementerian Kehutanan (diuraikan dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025–2029), dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025–2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 5.

Tabel 7 Indikator kinerja RPJMN 2025–2029 pada Ditjen KSDAE

No	Indikator	Level	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancam spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kegiatan Prioritas	Kelompok	200	775	1350	1925	2500
6	Nilai PNB dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektar	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8	Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
9	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Kegiatan Prioritas	Produk	15	15	20	20	25

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 6.

Tabel 8 Indikator kinerja program Ditjen KSDAE 2025-2029

Kode	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati							
SP1.1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Spesies	-	5	15	25	35	50
SP1.2	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	Spesies	-	3	8	15	30	50
SP2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga							
SP2.1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar	-	200	210	220	230	240
SP3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem							
SP3.1	Nilai Ekspor TSL dan Bioprospecting	Triliun	8,55	7,75	7,8	8	8,2	8,4
SP3.2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar	230,26	235	241	249	257	267

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE, berikut target kinerja Balai Besar Taman nasional Gunung Gede Pangrango selama periode Tahun 2025 – 2029.

Tabel 9 Indikator kinerja kegiatan BBTNGGP tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	0,8	-	-	-	-	Poin
2	Persentase Kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	20	20	20	20	20	Persen
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
3	Jumlah Unit KSA, KPA, TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	1	1	1	1	1	Unit
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	5	14	24	35	45	Kel. Msy
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
5	Jumlah Spesies yang Terdata Sebaran dan/atau Populasinya	5	10	15	20	25	Spesies
6	Jumlah Produk yang Dikembangkan Melalui Bioprospeksi	1	1	1	-	-	Produk
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB							
9	Jumlah Desa di Sekitar KPA yang Mendapat Manfaat dari Jasa Lingkungan	-	-	1	-	1	Desa
10	Presentase Pintu Masuk Objek Wisata yang Menerapkan e-ticketing dan Cashless Payment	3	3	10	10	15	Persen

11	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, TB	7.613.210	5.701.420	8.446.720	8.213.146	8.463.146	Ribu rupiah
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
13	Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	-	-	1.000	-	-	Hektar
14	Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB	320	1.119	1.119	1.119	1.119	Hektar
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen							
15	Nilai Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00	Poin
16	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	88,84	89,04	89,24	89,44	89,64	Poin

4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango meliputi kebutuhan belanja operasional maupun belanja non operasional yang dipenuhi dari APBN, mitra, dan hibah langsung lainnya yang tidak tercatat, berikut rincian kebutuhan pendanaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2025 – 2029:

Tabel 10 Kerangka pendanaan Ditjen KSDAE tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Anggaran (x1000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	27.920.000	79.000.000	88.700.000	89.650.000	89.460.000
2	Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	183.952.000	308.178.250	372.599.200	452.734.440	539.105.250
3	Konservasi Spesies dan Genetik	123.600.000	209.040.000	268.404.000	311.334.400	322.747.840
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB	38.576.932	205.950.000	327.362.500	338.118.750	213.340.625
5	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	115.582.600	581.646.000	724.577.000	803.050.400	790.822.000
6	Dukungan Manajemen Ditjen KSDAE Ops lainnya	1.210.641.191	1.755.480.000	1.825.480.000	1.808.480.000	1.885.480.000

Pendanaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, harapannya dapat terpenuhi melalui dana APBN. Meskipun begitu, pada aplikasinya selalu terdapat kekurangan yang akhirnya dipenuhi dari sumber dana yang lain, yaitu kerja sama dengan mitra kawasan. Berikut ini adalah tabel rincian pendanaan TNGGP selama lima tahun

Tabel 11 Kerangka pendanaan BBTNGGP tahun 2025-2029

No	Eselon II/Kegiatan	Anggaran (x1000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi						
1	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	280.000	-	-	-	-
Direktorat Konservasi Kawasan						
2	Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1.089.000	1.090.000	1.091.000	1.092.000	1.093.000
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik						
3	Konservasi Spesies dan Genetik	580.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan						
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB	230.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi						
5	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	61.000	762.500	762.500	762.500	762.500
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE						
6	Dukungan Manajemen Ditjen KSDAE dan Ops lainnya	20.927.283	24.571.032	24.571.032	24.571.032	24.571.032

V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2025–2029 ini merupakan pedoman kerja jangka menengah bagi segenap jajaran BBTNGGP dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Renstra ini telah disusun selaras dengan kerangka pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029), Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025–2029. Implementasi Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja Tahunan yang lebih rinci, namun dokumen ini memberi arah strategis dan target akhir yang jelas untuk lima tahun ke depan.

Melalui pelaksanaan Renstra 2025–2029, Balai Besar TNGGP bertekad meningkatkan kontribusi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bagi pembangunan berkelanjutan. Upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari akan dilaksanakan secara seimbang, dengan inovasi dan kolaborasi sebagai kunci. Tantangan konservasi ke depan tidaklah ringan – perubahan iklim, dinamika sosial ekonomi, dan perkembangan zaman menuntut pendekatan yang adaptif. Oleh karena itu, Renstra ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal dan reformasi tata kelola agar organisasi mampu merespon tantangan secara gesit (*agile*).

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BBTNGGP 2025–2029 sangat bergantung pada dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan. Sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, akademisi, LSM, dunia usaha, dan seluruh pencinta alam akan terus dipererat. Melalui visi bersama “meningkatnya manfaat konservasi hutan hujan tropis untuk pembangunan wilayah dan masyarakat”, Balai Besar TNGGP optimis bahwa selama lima tahun mendatang akan tercipta capaian nyata: kelestarian kawasan tetap terjaga, populasi satwa kunci stabil, insiden gangguan menurun, jasa ekosistem mengalir bagi kesejahteraan masyarakat, dan institusi pengelola makin akuntabel.

Sebagai dokumen yang dinamis, Renstra ini akan dievaluasi secara periodik. Penyesuaian mungkin dilakukan bila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi yang signifikan, namun visi dan misi dasar akan tetap menjadi pijakan. Dengan demikian, Renstra 2025–2029 diharapkan menjadi naskah final perencanaan yang dapat langsung diimplementasikan dan menjadi acuan seluruh pihak di Balai Besar TNGGP. Semoga upaya bersama ini dapat mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang lestari dan memberikan manfaat optimal bagi alam dan manusia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana kegiatan BBTNGGP Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan				
		2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi						
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati						
1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	– Evaluasi capaian RPTN – Penyusunan Renstra – Penyusunan rencana wilayah kerja resor – Pemeliharaan pal batas	– Pemeliharaan pal batas – Penyusunan renja	– Penyusunan RPTN – Pemeliharaan pal batas – Penyusunan renja	– Penyusunan RPTN – Pemeliharaan pal batas – Penyusunan renja	– Penyusunan Renstra – Pemeliharaan pal batas – Penyusunan renja
2	Persentase Kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	– Optimalisasi tata kelola kerja sama	– Optimalisasi tata kelola kerja sama	– Optimalisasi tata kelola kerja sama	– Optimalisasi tata kelola kerja sama	– Optimalisasi tata kelola kerja sama
Direktorat Konservasi Kawasan						
Kegiatan Pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
3	Jumlah Unit KSA, KPA, TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	– Inventarisasi usaha/kegiatan terbangun – Smart Patrol	– Smart Patrol – Penguatan Resor	– Smart Patrol – Penguatan Resor	– Smart Patrol – Penguatan Resor	– Smart Patrol – Penguatan Resor
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	– Pendampingan KTH dalam rangka pemberdayaan masyarakat –	– Pengembangan kelembagaan – Fasilitasi pendampingan masyarakat – Bantuan usaha ekonomi produktif	– Pengembangan kelembagaan – Fasilitasi pendampingan masyarakat	– Pengembangan kelembagaan – Fasilitasi pendampingan masyarakat	– Pengembangan kelembagaan – Fasilitasi pendampingan masyarakat

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

5	Jumlah Spesies yang Terdata Sebaran dan/atau Populasinya	– Survey/Monitoring keanekaragaman hayati lima taksa – Penanganan satwa konflik dan penyelamatan tumbuhan	– Survey/Monitoring keanekaragaman hayati lima taksa	– Survey/Monitoring keanekaragaman hayati lima taksa	– Survey/Monitoring keanekaragaman hayati lima taksa	– Survey/Monitoring keanekaragaman hayati lima taksa
6	Jumlah Produk yang Dikembangkan Melalui Bioprospeksi	– Pengembangan bioprospeksi	– Pengembangan lanjutan bioprospeksi	– Pembuatan produk bioprospeksi	– Pengembangan produk bioprospeksi	– Pengembangan produk bioprospeksi

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB

9	Jumlah Desa di Sekitar KPA yang Mendapat Manfaat dari Jasa Lingkungan	– Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perijinan berusaha jasling wisata alam	– Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perijinan berusaha jasling wisata alam	– Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perijinan berusaha jasling wisata alam	– Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perijinan berusaha jasling wisata alam	– Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perijinan berusaha jasling wisata alam
10	Presentase Pintu Masuk Objek Wisata yang Menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>Cashless Payment</i>	– Dukungan digitalisasi tiket masuk dan cashless payment	– Dukungan digitalisasi tiket masuk dan cashless payment	– Dukungan digitalisasi tiket masuk dan cashless payment	– Dukungan digitalisasi tiket masuk dan cashless payment	– Dukungan digitalisasi tiket masuk dan cashless payment
11	Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, TB	– Penatausahaan PNBPN dari wisata alam	– Penatausahaan PNBPN dari wisata alam	– Penatausahaan PNBPN dari wisata alam	– Penatausahaan PNBPN dari wisata alam	– Penatausahaan PNBPN dari wisata alam

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi

13	Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	–	– Pemetaan areal preservasi di sekitar	– Intervensi pemulihan areal preservasi di	– Intervensi pemeliharaan pemulihan areal	–
----	---	---	--	--	---	---

			kawasan	sekitar kawasan	preservasi di sekitar kawasan	
14	Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB	– Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi – Penanaman intensif – Pemeliharaan	– Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi – Pemeliharaan pemulihan ekosistem	– Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi – Pemeliharaan pemulihan ekosistem	– Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi – Pemeliharaan pemulihan ekosistem	– Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi – Pemeliharaan pemulihan ekosistem
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Kegiatan Dukungan Manajemen						
15	Nilai Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	– Penyusunan dokumen SPIP	– Penyusunan dokumen SPIP	– Penyusunan dokumen SPIP	– Penyusunan dokumen SPIP	– Penyusunan dokumen SPIP
16	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	– Penyusunan rencana kerja dan anggaran – Pemantauan, evaluasi dan pelaporan – Pengelolaan data dan informasi	– Penyusunan rencana kerja dan anggaran – Pemantauan, evaluasi dan pelaporan – Pengelolaan data dan informasi	– Penyusunan rencana kerja dan anggaran – Pemantauan, evaluasi dan pelaporan – Pengelolaan data dan informasi	– Penyusunan rencana kerja dan anggaran – Pemantauan, evaluasi dan pelaporan – Pengelolaan data dan informasi	– Penyusunan rencana kerja dan anggaran – Pemantauan, evaluasi dan pelaporan – Pengelolaan data dan informasi

